MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: 34/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2026

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 643 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 4.430 formasi, yang penempatannya pada satuan kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan rincian satuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, jenis kebutuhan, dan jumlah formasi mengacu pada penetapan kebutuhan yang telah disahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

No.	Jabatan	Kode Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan			Jumlah
				Umum	Disabilitas	Papua	
1	Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Umum (S-1)	CHU	S-1 HUKUM S-1 ILMU HUKUM	842	-	8	850
2	Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Agama (S-1)	CHG	S-1 HUKUM S-1 ILMU HUKUM S-1 HUKUM KELUARGA S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH) S-1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKSIYAH) S-1 HUKUM EKONOMI ISLAM S-1 HUKUM EKONOMI SYARI`AH S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU`AMALAH) S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (SYARIAH) S-1 HUKUM TATA NEGARA S-1 HUKUM TATA NEGARA DAN PIDANA ISLAM S-1 HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH) S-1 PIDANA ISLAM S-1 PERBANDINGAN MAZHAB S-1 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM S-1 SYARIAH PERBANDINGAN MAZHAB S-1 HUKUM PIDANA (JINAYAH) S-1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) S-1 JINAYAH S-1 JINAYAH SIYASAH S-1 MUAMALAH JINAYAH S-1 SIYASAH JINAYAH S-1 SYAR'IYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'IYAH/MUAMALAH)	588	-	12	600

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Jabatan	Kode Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan			Jumlah
				Umum	Disabilitas	Papua	
3	Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (S-1)	CHT	S-1 HUKUM S-1 ILMU HUKUM	150	-	-	150
4	Konselor SDM (S-1)	KSD	S-1 PSIKOLOGI S-1 MANAJEMEN SDM	45	-	-	45
5	Penata Keprotokolan (S-1)	PKPT	S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	120	-	-	120
6	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (S-1)	PSTI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 SISTEM INFORMASI S-1 ILMU KOMPUTER S-1 KOMPUTER S-1 INFORMATIKA	632	84	-	716
7	Penelaah Teknis Kebijakan (S-1)	PTK	S-1 HUKUM S-1 ILMU HUKUM S-1 HUKUM KELUARGA S-1 HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH) S-1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSIYAH) S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKSIYAH) S-1 HUKUM EKONOMI ISLAM S-1 HUKUM EKONOMI SYARI`AH S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU`AMALAH) S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH (SYARIAH) S-1 HUKUM TATA NEGARA S-1 HUKUM TATA NEGARA DAN PIDANA ISLAM S-1 HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH) S-1 PIDANA ISLAM S-1 PERBANDINGAN MAZHAB S-1 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM S-1 SYARIAH PERBANDINGAN MAZHAB S-1 HUKUM PIDANA (JINAYAH) S-1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) S-1 JINAYAH S-1 JINAYAH SIYASAH S-1 MUAMALAH JINAYAH	510	-	-	510

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Jabatan	Kode Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Penetapan Kebutuhan			Jumlah
				Umum	Disabilitas	Papua	
			S-1 SIYASAH JINAYAH S-1 SYAR'IYAH (AHWAL SYAKHSIYAH/JINAYAH/SIYASAH SYAR'IYAH/MUAMALAH)				
8	Penelaah Teknis Kebijakan (S-1)	PTKA	S-1 AKUNTANSI	70	-	-	70
9	Penelaah Teknis Kebijakan (S-1)	PTKS	S-1 TEKNIK SIPIL	20	-	-	20
10	Penelaah Teknis Kebijakan (S-1)	PTKB	S-1 EKONOMI S-1 AKUNTANSI S-1 MANAJEMEN	100	-	-	100
11	Penelaah Teknis Kebijakan (S-1)	PTKR	S-1 ARSITEKTUR	5	-	-	5
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (S-1)	PBJ	S-1 EKONOMI S-1 AKUNTANSI S-1 HUKUM	80	-	-	80
13	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (S-1)	PHM	S-1 DESAIN GRAFIS	3	-	-	3
14	Asesor SDMA Ahli Pertama (S-1)	ASDM	S-1 PSIKOLOGI	5	-	-	5
15	Perawat Terampil (D-III)	PWT	D-III KEPERAWATAN	5	-	-	5
16	Pengelola Penanganan Perkara (D-III)	PNP	D-III HUKUM D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PUBLIK D-III MANAJEMEN D-III KOMPUTER D-III KEARSIPAN D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN	100	-	-	100
17	Pengolah Data dan Informasi (D-III)	PDDI	D-III HUKUM D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PUBLIK D-III MANAJEMEN D-III KOMPUTER D-III KEARSIPAN D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN DOKUMEN	140	5	-	145
18	Pengadministrasi Perkantoran/ Petugas Pengamanan Persidangan(SLTA Sederajat)	PTP	SLTA SEDERAJAT	906	-	-	906

III. KRITERIA PELAMAR

A. Penetapan Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan SLTA sederajat atau lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

B. Penetapan Kebutuhan Khusus terdiri dari:

a. Penyandang Disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagaimana berikut:

i. melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan PNS; dan

ii. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar.

b. Putra/Putri Papua dapat dilamar oleh pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua, dibuktikan dengan:

i. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan

ii. surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia:
   a. paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 25 (dua puluh lima tahun) 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar untuk jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan;
   b. paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar untuk jabatan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar untuk jabatan lainnya.

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau Pegawai Swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bagi pelamar jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan, Tinggi Badan minimal:
    a. Pria 165 cm;
    b. Wanita 158 cm;
11. Bagi pelamar dengan kualifikasi Sarjana (S1) untuk jabatan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol);
12. Bagi pelamar dengan kualifikasi Diploma III (DIII) dan Sarjana (S1) untuk jabatan lainnya, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

13. Bagi pelamar dengan kualifikasi SLTA sederajat, nilai minimal rata-rata ijazah 7,0 (tujuh koma nol) skala 10,0 (sepuluh koma nol);
14. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mendapatkan penetapan penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol) untuk jabatan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk jabatan lainnya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol);
15. Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara memiliki sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran oleh lembaga penyelenggara tes resmi yang diakui dan terakreditasi, dengan skor paling rendah TOEFL Paper-Based Test (PBT)/Institutional Testing Program (ITP): 475 (empat ratus tujuh puluh lima), TOEFL Internet-Based Test (iBT): 50 (lima puluh), atau International English Language Testing System (IELTS): 5.0 (lima koma nol);
16. Bagi pelamar untuk jabatan lain, kecuali Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan memiliki sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal pendaftaran oleh lembaga penyelenggara tes resmi yang diakui dan terakreditasi, dengan skor paling rendah TOEFL Paper-Based Test (PBT)/Institutional Testing Program (ITP): 450 (empat ratus lima puluh), TOEFL Internet-Based Test (iBT): 45 (empat puluh lima), atau International English Language Testing System (IELTS): 5.0 (lima koma nol);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

17. Bagi pelamar jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan:
    a. berstatus belum menikah atau tidak pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Belum Menikah atau Tidak Pernah Menikah dari Kelurahan/Desa sesuai domisili/KTP selama proses seleksi sampai dengan pendidikan;
    b. tidak mengajukan penyesuaian pendidikan dan/atau tugas belajar sampai dengan memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sebagai PNS;
    c. diutamakan memiliki sertifikat bela diri.
18. Bagi pelamar jabatan Perawat Terampil memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran dan dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
19. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima;
20. Tidak mengajukan mutasi dari satuan kerja sampai dengan memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sebagai PNS;
21. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan Mahkamah Agung.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata cara pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 27 November 2026 dan ditutup pada tanggal 21 Desember 2026 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar masuk ke laman https://sscasn.bkn.go.id menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran.

B. Dokumen persyaratan

Pelamar **WAJIB** mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna pada laman https://sscasn.bkn.go.id serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokumen kelulusan pendidikan, dengan ketentuan:
   a. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Umum, Penyandang Disabilitas, dan Putra/Putri Papua sebagai berikut:
      1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama;
      2) Surat akreditasi/surat keterangan akreditasi/tangkapan layar pada PDDIKTI/BAN-PT dari akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   b. Bagi pelamar jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan dengan kualifikasi SLTA sederajat:
      1) Ijazah asli SLTA sederajat yang berasal dari Dalam Negeri yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau terdaftar di Kementerian Agama dengan nilai minimal rata-rata ijazah 7,0 (tujuh koma nol) skala 10,0 (sepuluh koma nol);
      2) Ijazah asli SLTA Sederajat yang berasal dari sekolah Luar Negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau terdaftar di

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kementerian Agama dengan nilai minimal rata-rata ijazah 7,0 (tujuh koma nol) skala 10,0 (sepuluh koma nol);

2. Transkrip nilai asli bagi pelamar dengan Kualifikasi Diploma III (DIII) atau Sarjana (S1) dengan indeks prestasi kumulatif sesuai dengan persyaratan pelamar masing-masing jabatan sebagaimana diatur dalam Bab IV di atas dan bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Wajib melampirkan transkrip nilai dan surat hasil nilai konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama;
3. Surat lamaran dan pernyataan yang telah ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai tempel atau meterai elektronik/e-meterai Rp10.000,- yang valid (format dapat diunduh pada https://sscasn.bkn.go.id);
4. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah yang dikeluarkan mulai tanggal pendaftaran, khusus pelamar jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan surat keterangan sehat mencantumkan Tinggi Badan, Berat Badan, dan Indeks Massa Tubuh (IMT);
5. Bagi jabatan yang wajib memiliki sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris yakni sertifikat TOEFL *Paper-Based Test* (PBT)/*Institutional Testing Program* (ITP), TOEFL *Internet-Based Test* (iBT), atau *International English Language Testing System* (IELTS) dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Bab IV Persyaratan Pelamar di atas, dilengkapi setelah dinyatakan lulus SKD dalam bentuk *Certificate of Achievement* (CoA) dan dibawa pada saat mengikuti SKB Potensi Akademik, serta diunggah pada laman https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/cpns2026;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar jabatan Perawat Terampil;
7. Surat Keterangan Belum Menikah atau Tidak Pernah Menikah bagi pelamar Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan;
8. Sertifikat bela diri bagi pelamar Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan (diutamakan);

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9. Bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas:
    a. wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya serta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan PNS;
    b. wajib membuat video yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan meng*input link* video tersebut pada laman https://sscasn.bkn.go.id serta memastikan *link* dapat diakses oleh panitia seleksi;
10. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Putra/Putri Papua wajib menyertakan:
    a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
    b. surat keterangan asli dari Kepala Desa/Kepala Suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan Computer Assisted Test (CAT);
3. Pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024;
c. melamar pada Jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026;
d. memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
e. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026;
f. pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;
g. pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026.

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%, sebagai berikut:
   a. SKB untuk Jabatan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim terdiri atas:
      - CAT BKN dengan bobot 50% dari nilai SKB secara keseluruhan;
      - Potensi Akademik tertulis 25% dari nilai SKB secara keseluruhan;
      - Psikotes 15% dari nilai SKB secara keseluruhan;
      - Wawancara dengan bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan untuk Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Umum dan Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Tata Usaha Negara;
      - Khusus untuk Analis Perkara Peradilan/Calon Hakim Agama bobot 10% terdiri atas wawancara dan membaca kitab kuning.
   b. SKB untuk Jabatan Pengadministrasi Perkantoran/Petugas Pengamanan Persidangan terdiri atas:
      - CAT BKN dengan bobot 50% dari nilai SKB secara keseluruhan;
      - Kesamaptaan dengan bobot 30% dari nilai SKB (menggugurkan);
      - Psikotes dengan bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan;
      - Wawancara dengan bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.
   c. SKB untuk Jabatan selain huruf a dan b terdiri atas:
      - CAT BKN dengan bobot 50% dari nilai SKB secara keseluruhan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

- Potensi Akademik muatan Mahkamah Agung dan Peradilan dengan bobot 40% dari nilai SKB secara keseluruhan;
- Wawancara dengan bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

VII. KETENTUAN KELULUSAN

A. Seleksi Administrasi

1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id sebagaimana dalam pengumuman;
2. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan ketentuan.

C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

D. Kelulusan Akhir

Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

VIII. MASA SANGGAH

1. Masa sanggah diberikan sesuai jadwal dan ketentuan resmi pada setiap tahapan seleksi yang menyediakan mekanisme sanggah;
2. Sanggahan disampaikan melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dalam periode yang telah ditentukan, dengan mengemukakan alasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Panitia seleksi memeriksa sanggahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Sanggahan tidak digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang sejak awal tidak dipersyaratkan atau tidak diunggah pelamar;
4. Hasil sanggah diumumkan melalui kanal resmi yang ditetapkan.

IX. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi CPNS Tahun Anggaran 2026 mengacu pada jadwal resmi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman seleksi	27 November s.d. 9 Desember 2026
2	Pendaftaran seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3	Seleksi administrasi	30 November 2026 s.d. 4 Januari 2027
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	5 Januari s.d. 8 Januari 2027
5	Masa sanggah administrasi	9 Januari s.d. 11 Januari 2027
6	Pengumuman pasca-sanggah	14 Januari s.d. 16 Januari 2027
7	Pelaksanaan SKD CPNS	2 Februari s.d. 21 Februari 2027
8	Pengumuman hasil SKD CPNS	1 Maret s.d. 7 Maret 2027
9	Pelaksanaan SKB CPNS	30 Maret s.d. 6 April 2027
10	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	3 April s.d. 12 April 2027

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

No.	Kegiatan	Jadwal
11	Pengumuman Hasil CPNS	15 April s.d. 20 April 2027
12	Masa sanggah	21 April s.d. 23 April 2027
13	Jawab sanggah	21 April s.d. 24 April 2027
14	Pengumuman pasca-masa sanggah	29 April s.d. 2 Mei 2027
15	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)	3 Mei s.d. 17 Mei 2027
16	Usul penetapan NIP CPNS	8 Mei s.d. 22 Mei 2027

a. Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://www.mahkamahagung.go.id;
b. Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah;
c. Peserta wajib memantau informasi di laman tersebut.

X. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya;
2. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran jasa dari pihak lain yang mengatasnamakan panitia seleksi;
3. Kelulusan merupakan hasil usaha dan prestasi pelamar sendiri. Pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak manapun yang berkaitan dengan proses seleksi;
4. Pelamar wajib memantau perkembangan informasi dan pengumuman melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan laman https://www.mahkamahagung.go.id. Kelalaian pelamar dalam membaca pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Pelamar yang memberikan data atau dokumen tidak benar, melakukan kecurangan, atau tidak memenuhi persyaratan dapat digugurkan pada setiap tahapan seleksi dan/atau setelah dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelamar yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal dan ketentuan dinyatakan gugur;
7. Keputusan panitia seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai sanggah dan upaya administratif mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan;
8. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Pertanyaan teknis terkait https://sscasn.bkn.go.id disampaikan melalui kanal helpdesk resmi BKN. Pertanyaan terkait kebijakan dan formasi Mahkamah Agung disampaikan melalui helpdesk seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung;
10. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
    a. *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
    b. *WhatsApp* : 0822-11011-667
       pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
    c. *X* : @CASN_MA_RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

d. *Instagram* : rekrutmencasn.mahkamahagung.

13. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung, pada laman https://siwas.mahkamahagung.go.id;
14. Seluruh pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 27 November 2026
Ketua Panitia Seleksi,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sobandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.